

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Teori keagenan (*agency theory*) menerapkan adanya pemisahan kepemilikan antara manajemen yang dikepalai seorang manajer (*agent*) dan pemilik perusahaan (*principal*). Pemilik perusahaan akan memberikan kewenangan bagi manajemen untuk mengelola kekayaan investor dengan menjalankan perusahaan dan kewenangan untuk mengambil keputusan atas nama pemilik (Setyapurnama dan Vianey, 2007 dalam Hardiyanti, 2012). Selain beberapa kewenangan yang diberikan, pihak pemilik membebankan tanggung jawab untuk melaporkan kondisi perusahaan dan hal yang dilakukan manajemen dalam bentuk laporan keuangan yang akan dipakai oleh berbagai pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan (*stakeholder*).

Dengan adanya pemisahan kepemilikan tersebut dapat diasumsikan akan terjadi konflik kepentingan (*conflict of interest*) diantara kedua pihak karena masing-masing pihak memiliki kepentingan berbeda untuk memaksimalkan kesejahteraannya sehingga muncullah informasi asimetri antara manajemen (*agent*) dengan pemilik (*principal*). Posisi pihak manajemen perusahaan tampak lebih menguntungkan karena pihak manajemen lebih mengetahui informasi internal dan prospek perusahaan di masa yang akan datang dibandingkan pemegang saham dan *stakeholder* lainnya.

Maka dari itu, karena adanya keinginan untuk mencapai tujuan untuk mensejahterakan pihaknya maka manajemen bisa saja mengorbankan kepentingan pihak lain termasuk kesejahteraan pemilik perusahaan yang seharusnya menjadi tujuan utama perusahaan dikelola dan dijalankan oleh pihak manajemen. Maka muncul kesempatan bagi pihak manajemen untuk melakukan manajemen laba (*earnings management*).

Manajemen laba adalah tindakan yang ditujukan untuk memaksimalkan utilitas manajer dan cenderung untuk menguntungkan diri mereka (manajer) sendiri dengan cara mempengaruhi proses pelaporan keuangan. Praktek manajemen laba oleh manajer berawal dari adanya asimetri informasi karena konflik kepentingan. Selain itu, Aini (2011) mendefinisikan manajemen laba sebagai kegiatan memanipulasi dan mengelola laba sehingga laba akuntansi dapat mencapai target yang diinginkan pihak internal maupun eksternal perusahaan.

Tindakan manajemen laba ini mengurangi relevansi dan keandalan dari laporan keuangan dan dapat mengurangi tingkat kepercayaan terhadap laporan keuangan itu sendiri kemudian menyesatkan dalam pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pemakai laporan keuangan. Laba ekonomi merupakan selisih antara pendapatan dan beban (Ghozali dan Chariri, 2007 dalam Nur'aini, 2012).

Oleh sebab itu pendapatan dan beban dapat dijadikan sasaran dalam mengelola atau mengendalikan laba. Pendapatan cenderung dijadikan sasaran dalam melakukan manajemen laba karena manajemen hanya memanfaatkan kebijakan operasional untuk mengubah periode pengakuan pendapatan.

Ada dua kemungkinan yang dapat dilakukan pada pendapatan. Pertama menaikkan pendapatan dengan mengakui pendapatan secara lebih awal sehingga menaikkan laba. Atau kedua, menurunkan pendapatan dengan menunda pengakuan atau pencatatan pendapatan yang menyebabkan menurunnya angka laba. Begitupula dengan beban. Beban dapat dinaikkan atau diturunkan dengan mengandalkan biaya diskresi (Roychowdhury, 2006 dalam Aini, 2012).

Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) melalui Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No.1 (Revisi 2009) paragraf 19 perusahaan diharuskan untuk menyusun laporan keuangan atas dasar akrual, kecuali laporan arus kas (PSAK, 2009). Dalam penyusunan laporan keuangan, dasar akrual dipilih karena lebih rasional dan adil dalam mencerminkan kondisi keuangan secara riil, namun disisi lain penggunaan dasar akrual dapat memberikan keleluasaan bagi manajemen dalam memilih metode akuntansi selama tidak menyimpang dari Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku Akuntansi akrual juga merupakan kesempatan bagi manajer untuk mengimplementasikan strategi manajemen laba dengan memilih kebijakan akuntansi dan *discretionary accruals* (Achmad, et al., 2007 dalam Aini, 2011).

Manajemen laba terjadi ketika manajemen menggunakan keputusan tertentu dalam laporan keuangan dan transaksi untuk mengubah laporan keuangan sebagai dasar kinerja perusahaan yang bertujuan menyesatkan pemilik atau pemegang saham atau untuk mempengaruhi hasil kontraktual yang mengandalkan angka-angka akuntansi yang dilaporkan (Healy dan Wahlen, 1999 dalam Trihapsari, 2006). Manajemen laba berbeda dengan perataan laba (*income*

smoothing) karena perataan laba (*income smoothing*) adalah tindakan untuk meratakan laba yang dilaporkan dalam laporan keuangan, dengan tujuan pelaporan eksternal, terutama bagi investor, karena umumnya investor menyukai laba yang relatif stabil. Oleh karena itu perataan laba (*income smoothing*) merupakan bagian dari manajemen laba (Gumanti, 2000 dalam Anggraini, 2012).

Prinsip akuntansi yang berlaku umum (*Generally Accepted Accounting Principles*) tidak bersifat kaku dalam artian bahwa GAAP memberikan kebebasan dalam menentukan metode maupun estimasi akuntansi yang dapat digunakan perusahaan secara fleksibel.

Fleksibilitas tersebut akan mempengaruhi perilaku manajer dalam melakukan pencatatan akuntansi dan pelaporan keuangan perusahaan dan hal tersebut memungkinkan agent untuk memilih metode yang akan menguntungkan pihaknya kemudian menyajikannya untuk kepentingan perusahaan. Manajer dapat melakukan perilaku menyimpangan dalam menunjukkan informasi laba yang disebut dengan *Earning Management* (manajemen laba), yaitu pilihan bagi manajer dalam menentukan kebijakan akuntansi untuk mencapai tujuan – tujuan tertentu (Scoot, 1997 dalam Warner, 2007 dalam Sagita, 2010).

Seperti halnya ditulis Utami (2005) dalam Triyanto (2012) mengukur manajemen laba dengan menggunakan rasio akrual modal kerja terhadap penjualan. Hal ini juga diungkapkan dalam Rahmawati (2008) dalam Aini (2012) dimana untuk mendeteksi ada tidaknya manajemen laba, maka pengukuran atas akrual adalah hal yang sangat penting untuk diperhatikan.

Seringkali praktek manajemen laba sulit terdeteksi karena perhatian principal hanya terpusat pada informasi laba yang disajikan agent tanpa memperhatikan prosedur yang digunakan untuk menghasilkan informasi laba tersebut. Menurut teori keagenan, untuk mengatasi masalah konflik kepentingan antara principal dan agent dapat dilakukan melalui pengelolaan perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*). Beberapa mekanisme internal GCG seperti struktur dan dewan komisaris, serta mekanisme eksternal GCG seperti pasar untuk kontrol perusahaan diharapkan dapat mengatasi konflik kepentingan yang disebabkan oleh teori keagenan tersebut (Bernhart dan Rosenstein, 1998 dalam Siallagan dan Machfoedz, 2006).

Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) telah menjadi kebutuhan bagi setiap perusahaan dan organisasi bukan hanya sekedar kewajiban. *Good Corporate Governance* (GCG) diperlukan untuk mempertahankan keberlangsungan hidup perusahaan dan membangun kepercayaan jangka panjang bagi perusahaan.

Menurut Shleifer dan Vishny (1997); Trihapsari (2006), GCG merupakan suatu mekanisme yang digunakan oleh supplier keuangan untuk melakukan kontrol terhadap manajer guna memastikan bahwa supplier keuangan perusahaan memperoleh pengembalian (*return*) dari kegiatan yang dijalankan oleh manajer.

Krisis ekonomi yang terjadi tahun 1997-1998 di Asia salah satunya diakibatkan karena lemahnya praktek GCG. Menurut Tjager et al (2003) dalam Hermanto (2010), beberapa Negara Asia terkena dampaknya dikarenakan adanya

kondisi objektif yang relatif sama antara negara-negara tersebut yang membuat negara-negara tersebut tidak siap memasuki era globalisasi dan pasar bebas.

Krisis ekonomi yang terjadi di Asia terutama Indonesia tahun 1997–1998 memberi pelajaran berharga bahwa pembangunan yang terus dipacu ternyata tidak didukung dengan struktur ekonomi yang kokoh. Hampir semua pengusaha besar menjalankan roda bisnis dengan manajemen yang tidak teratur dan penuh praktik korupsi, kolusi dan nepotisme karena penerapan GCG yang buruk. Kejadian tersebut yang menjadi latar belakang dimulainya perbaikan konsep penerapan GCG terhadap perusahaan – perusahaan di Indonesia sebagai pengacu pergerakan bisnis secara sehat sehingga diharapkan perekonomian juga turut ditunjang dengan adanya perubahan pergerakan bisnis perusahaan kearah yang lebih baik.

Selain itu, pada tahun 2001 masih ada kasus yang menunjukkan adanya manipulasi laporan keuangan oleh beberapa perusahaan seperti PT Lippo Tbk dan PT Kimia Farma Tbk (Boediono, 2005 dalam Yudha, 2012). PT. Kimia Farma Tbk. pada tahun 2002 mengindikasikan adanya praktik *earning management* dengan menaikkan laba hingga Rp 32,7 milyar. PT. Indofarma pada tahun 2004 melakukan praktik *earning management* dengan menyajikan *overstated* laba bersih senilai Rp 28,870 milyar, sebagai dampak dari penilaian persediaan barang dalam proses yang lebih tinggi dari yang seharusnya, sehingga harga pokok penjualan tahun tersebut *understated*. (Cornett, et al., 2006 dalam Hermanto, 2010). Hal tersebut menunjukkan bahwa manipulasi keuangan tetap dilakukan oleh beberapa perusahaan walaupun tahun kejadian sudah berselang jauh dari tahun saat krisis moneter terjadi tahun 1997–1998. Maka dari itu, tata kelola

perusahaan yang baik yang terformulasi dalam GCG terus digiatkan dan telah menjadi hal yang sangat esensial bagi perusahaan agar perusahaan dikelola sebagaimana mestinya dan memberikan hasil yang terbaik bagi tiap stakeholdernya.

Ada beberapa perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang terdahulu. Sumber populasi dan periode yang digunakan berbeda dengan penelitian lain seperti penelitian Natalia Stin Sagita (2010) yang mengambil populasi dari CGPI tahun 2008. Sagita (2010) meneliti mengenai hubungan GCG dengan manajemen laba dan kinerja keuangan. Bidang penelitian juga berbeda dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Siti Hardiyanti (2012) yang memfokuskan populasi penelitian dari sektor pertambangan dengan periode waktu yang berbeda dengan penelitian ini.

Dalam penelitian ini pembahasan difokuskan pada pengaruh GCG yang diproksi dengan ukuran dewan komisaris, proporsi dewan komisaris independen, ukuran komite audit, independensi komite audit dan kepemilikan saham institusional terhadap manajemen laba dengan populasi penelitian berupa perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI (Bursa Efek Indonesia) periode 2010–2012 dengan sampel perusahaan yang pernah mengikuti survei *Corporate Governance Perception Index (CGPI)* .

Pemilihan bidang perusahaan perbankan sebagai populasi dikarenakan perusahaan perbankan berkaitan dengan masyarakat luas sehingga cukup dikenal serta terpercaya maka tentu saja akan meminimalkan kemungkinan praktek manajemen laba. Selain itu, beberapa perbankan seperti PT. Mandiri.Tbk juga

tercatat sering menduduki peringkat 10 besar CGPI sehingga ketersediaan data lebih lengkap dibandingkan bidang lain.

Menurut Effendi (2009) dalam Sefiana (2010), perlu adanya suatu penelitian tentang efektifitas *corporate governance* pada industri perbankan karena industri perbankan memerlukan perhatian tersendiri, karena karakteristik dan kompleksitas industri perbankan yang berbeda dengan sektor lain. Karakteristik yang membedakan sektor perbankan dengan sektor lainnya adalah (Susilo dan Simarmata, 2007 dalam Sefiana, 2010) perbankan sebagai lembaga intermediasi di bidang keuangan yang dalam menjalankan usahanya menghadapi berbagai macam risiko usaha dan kegagalan kegiatan perbankan mempunyai pengaruh luas terhadap sektor ekonomi lainnya, baik makro maupun mikro, selain itu sebagai industry jasa, bank harus dapat memberikan pelayanan yang baik sesuai dengan fungsinya.

Oleh karena itu, sektor perbankan menjadi sektor yang *highly regulated* yang mempunyai lembaga otoritas perbankan yang secara khusus melakukan pengawasan dan pembinaan. Hal lain yang menjadi karakteristik perbankan adalah etika dan kehati-hatian yang merupakan aspek sangat penting bagi suatu bank.

Kebutuhan untuk menerapkan prinsip GCG adalah bagian penting dalam setiap transaksi perbankan. Bank Indonesia selaku regulator lembaga perbankan telah mengeluarkan banyak peraturan yang terkait langsung dengan upaya penerapan GCG salah satunya adalah dengan mengeluarkan peraturan No. 8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi bank umum yang selanjutnya diubah dengan Peraturan No.

8/14/PBI/2006 tentang Pelaksanaan GCG bagi Bank Umum (FCGI, 2008 dalam Sefiana, 2010).

Oleh karena itu, konsep *Good Corporate Governance* diharapkan bisa berfungsi sebagai alat untuk memonitor kinerja bank dan untuk memberikan keyakinan kepada para investor bahwa mereka akan menerima *return* yang sesuai dengan investasi yang telah ditanamkannya.

Pemilihan sampel pada perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang pernah mengikuti survei *Corporate Governance Perception Index* (CGPI) karena perusahaan-perusahaan tersebut mempunyai pemahaman yang baik tentang *corporate governance* dan telah melaksanakan prinsip-prinsip *corporate governance*. Perusahaan lembaga keuangan tidak dimasukkan dalam sampel penelitian karena perusahaan lembaga keuangan memiliki regulasi tersendiri yang dapat mempengaruhi variabel penelitian.

Dengan uraian latar belakang diatas maka dapat disimpulkan bahwa penelitian ini diberi judul “ **PENGARUH PENERAPAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* TERHADAP PRAKTEK MANAJEMEN LABA (*EARNING MANAGEMENT*) PADA PERUSAHAAN PERBANKAN YANG LISTING DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2010 - 2012**”

1.2. Rumusan Masalah

Tindakan manajemen laba (*earning management*) yang dilakukan oleh manajer dapat diminimumkan melalui penerapan GCG. Dari rumusan di atas, maka permasalahan pokok yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai

berikut : Apakah ada pengaruh dari penerapan *Good Corporate Governance* yang diproksi dengan ukuran dewan komisaris, proporsi dewan komisaris independen, ukuran komite audit, independensi komite audit dan kepemilikan saham institusional terhadap praktek manajemen laba di perusahaan sektor perbankan?

1.3. Pembatasan Masalah

Penelitian ini dilakukan hanya pada perusahaan sektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) yang mengikuti survei CGPI. Periode penelitian ini dilakukan tahun 2010 sampai dengan tahun 2012, karena keterbatasan waktu dan kemampuan peneliti.

1.4. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan latar belakang dan perumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh dari penerapan *Good Corporate Governance* yang diproksi dengan ukuran dewan komisaris, proporsi dewan komisaris independen, ukuran komite audit, independensi komite audit dan kepemilikan saham institusional terhadap praktek manajemen laba di perusahaan sektor perbankan.

1.5. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan pada permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak lain, seperti :

1. Pengguna Informasi Laba

Bagi pengguna informasi yang menjadikan laba sebagai tolak ukur kinerja perusahaan, hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu para pengguna dalam mengevaluasi apakah laba yang dihasilkan merupakan hasil tindakan manajemen laba atau bukan.

2. Bagi perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI)

Dapat memberikan gambaran kondisi dan efektifitas penerapan praktek *Good Corporate Governance* terhadap manajemen pada perusahaan *go public* di Indonesia, khususnya perusahaan sektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI), sehingga hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai pedoman dalam mengurangi adanya masalah keagenan.

3. Bagi Pengembangan Ilmu

Hasil penelitian ini diharapkan dapat:

- a. Memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu akuntansi keuangan, pasar modal dan akuntansi manajemen, terutama mengenai bagaimana penerapan GCG dalam suatu perusahaan dapat mengatasi permasalahan manajemen laba yang timbul karena teori keagenan.
- b. Sebagai referensi yang bermanfaat dan memberikan bahan masukan bagi peneliti selanjutnya yang juga tertarik untuk mengangkat permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.